

ABSTRAK

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah di bidang penyederhanaan perizinan perumahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendirikan bangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dipandang perlu adanya penyederhanaan dan penurunan biaya perizinan bagi pembangunan Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum dari izin mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait dengan izin mendirikan perumahan MBR dan untuk mengetahui implementasi dari PP Nomor 64 Tahun 2016 khususnya terkait dengan perizinan mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum *empiris*, di mana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan data primer sebagai bahan penunjang dengan melakukan wawancara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah terkait dengan izin mendirikan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberi kemudahan dan cepat didalam mengurus izin perumahan. Masyarakat Perbenghasilan Rendah (MBR), dalam pengurusan perizinan mendirikan perumahannya tidak perlu mengurus perizinan yang terkait dengan Ijin lokasi, Rekomendasi peil banjir, Persetujuan gambar *masterplan*, Permohonan pengesahan *siteplan*, Persetujuan dan pengesahan gambar *siteplan*, Izin *cut and fill*, Analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Terkait dengan kendala yang ditemukan dalam implementasi khususnya terkait dengan perizinan mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah adalah belum semua Pememerintah Daerah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk Peraturan Daerah khususnya terkait dengan Izin mendirikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Tentang Izin Mendirikan Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)